

**IMPLEMENTASI SK KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 6 KUTA
CANE NOMOR : 422/33/III.1/2019 TENTANG STANDARISASI
SARANA PRASARANA DI KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

TESIS

OLEH

**ERWANDI
NPM. 181801043**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SK KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 6 KUTA CANE NOMOR: 422/33/III.1/2019 TENTANG STANDARISASI SARANA PRASARANA DI KECAMATAN BADAR KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nama : Erwandi
NPM : 181801043
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

SDN 6 Kutacane Kecamatan Badar Kab. Aceh Tenggara semaksimal mungkin untuk melakukan manajemen dalam sarana dan prasarana. Namun, sarana dan prasarana yang dimiliki tidak optimal bahkan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana implementasi SK Kepsek SDN 6 Kuta Cane No. 422/33/III.1/2019 tentang standarisasi sarana dan prasarana di Kecamatan Badar Kab. Aceh Tenggara? (2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan standarisasi sarana prasarana di SDN 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kab. Aceh Tenggara? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi SK Kepsek No. 422/33/III.1/2019 tentang sarana prasarana di SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kab. Aceh Tenggara. Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut (1) Komunikasi di SDN 6 Kutacane telah berlangsung dengan baik dan hasilnya berupa kesepakatan seluruh pihak untuk menetapkan pemerataan standarisasi sarana dan prasarana. (2) Sumber daya di SDN 6 Kutacane dapat bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan mutu dan sarana prasarana di sekolah tersebut. Dan kurangnya tenaga administrasi dan anggaran yang belum optimal. (3) Sikap pelaksana pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana SDN 6 Kuta Cane dilakukan dengan baik, dilakukan dengan mekanisme organisasi yang baik dan mengarah pada asas pelaksanaan sarana dan prasarana yang ada. (4) Struktur birokrasi SDN 6 Kutacane belum sepenuhnya mengadakan analisa terhadap materi pelajaran yang membutuhkan alat pelajaran, alat peraga serta media pendidikan di sekolah. Saran dari penelitian ini adalah pihak sekolah mengkoordinasikan dengan komite sekolah untuk musyawarah bersama memecahkan masalah dana lewat bantuan. Kekurangan SDM pengelolaan sarana dan prasarana sebaiknya dapat saling berkoordinasi dengan cara mengikut sertakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya. Guru yang merupakan pelaksana dan pemakai media pembelajaran pada saat proses belajar mengajar baiknya selalu menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang di perlukan serta mempunyai tanggung jawab yang sama.

Kata Kunci : Implementasi, SK Kepala Sekolah, Sarana dan Prasarana, SD
UNIVERSITAS MEDAN AREA Kutacane.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF STATE HEAD OF ELEMENTARY SCHOOL 6 KUTA CANE NUMBER: 422/33/III.1/2019 CONCERNING STANDARDIZATION OF INFRASTRUCTURE FACILITIES IN BADAR DISTRICT ACEH TENGGARA DISTRICT

Name : Erwandi
NPM : 181801043
Study Program : Master of Public Administration Science
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Warjio, MA

SDN 6 Kutacane Badar District Kab. Southeast Aceh is as much as possible to carry out management in facilities and infrastructure. However, the facilities and infrastructure that are owned are not optimal and cannot even be used in accordance with their functions. Then the problem formulation is (1) How is the implementation of SK Kepsek SDN 6 Kuta Cane No. 422/33/III.1/2019 concerning standardization of facilities and infrastructure in the District of Badar, Kab. Southeast Aceh? (2) What factors hamper the standardization of infrastructure in SDN 6 Kuta Cane, Badar District, Kab. Southeast Aceh? The purpose of this study is to analyze the implementation of Kepsek Decree No. 422/33/III.1/2019 concerning infrastructure facilities in SD Negeri 6 Kuta Cane, Badar District, Kab. Southeast Aceh. The research method used in this research is descriptive qualitative analysis. Data collection was obtained from interviews, documentation, and observation. With the results of the study as follows (1) Communication at SDN 6 Kutacane has been going well and the results are in the form of an agreement of all parties to establish equalization of standardization of facilities and infrastructure. (2) Resources at SDN 6 Kutacane can work well together in improving the quality and infrastructure of the school. And the lack of administrative and budget staff is not yet optimal. (3) The attitude of the implementers of the management of facilities and infrastructure of SDN 6 Kuta Cane is done well, carried out with good organizational mechanisms and leads to the principle of the implementation of existing facilities and infrastructure. (4) The bureaucratic structure of SDN 6 Kuta Cane has not yet fully conducted an analysis of the subject matter that requires learning tools, teaching aids and educational media in schools. The suggestion from this research is that the school coordinates with the school committee to hold a joint meeting to solve the funding problem through assistance. Lack of human resources in managing facilities and infrastructure should be able to coordinate with each other by including education and training in accordance with their fields. The teacher who is the implementer and user of the learning media during the teaching and learning process.

Keywords : *Implementation, Facilities and infrastructure, Kutacane Public Elementary School 6, Principal's Decree.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi Kebijakan	13
2.3 Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.4 Pengukuran Implementasi Kebijakan.....	21
2.5 Pengertian Sarana dan Prasarana	25
2.6 Macam-macam SaranadanPrasarana	27
2.7 Standardisasi Saranadan Prasarana.....	30
2.8 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi danWaktu Penelitian	35
3.3 Informan Penelitian.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisis Data	38

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

3.5.1. Reduksi Data	39
3.5.2. Penyajian Data.....	39
3.5.3. Verifikasi	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi.....	40
4.2 Gambaran Umum SD Negeri 6 Kuta Cane.....	40
4.2.1. Keadaan Tenaga Pendidik.....	41
4.2.2. Keadaan SiswaSD Negeri 6 Kuta Cane	44
4.2.3. Sarana dan Prasarana SD Negeri 6 Kuta Cane.....	44
4.2.4. Struktur Organisasi	47
4.2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah	47
4.2.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Sekolah	47
4.2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Perpustakaan	48
4.2.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Penjaga Sekolah.....	48
4.2.4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Guru	48
4.3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional	49
4.4 Implementasi Sarana Prasarana	55
4.5 Hambatan Sarana Prasarana.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apaarti dan hakikat hidup,serta untuk apadan bagaimana menjalan kantugas hidup dan kehidupan secara benar.Karena itulah fokus pendidikan diarah kanpada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika,hati,akhlak, dan keimanan. Puncak pendidikan adalah tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup.Setiap tahunketahun salahsatu problem yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah mutu pendidikan yang rendah pada tiap jenjang dan satuanjenjang pendidikan.Mutupen didikan yang rendah di Indonesia dapat menyebabkan tersumbatnya penyediaan sumberdayamanusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.Menurut Pasal 1Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003,Pendidikan nasional berfungsi imengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa,dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agarmenjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu,cakap,kreatif,mandiri,dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan, kecakapan keterampilan dan sikap-sikap dasar yang diperlukan untuk pembentukan dan pengembangan pribadi yang utuh. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, seluruh komponen pendidikan di sekolah harus berusaha meningkatkan diri guna mendukung kemajuan pendidikan itu sendiri. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu wacana penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, masih perlu banyaknya upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Usaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan diawali dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran yang ada pada semua jenjang pendidikan, karena proses pembelajaran ini merupakan kegiatan utama di

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

suatu sekolah. Empat faktor penting yang harus ada dalam proses ini yaitu guru, murid, kurikulum, dan bahan pelajaran. Keempat faktor tersebut akan membuat proses pembelajaran dapat terlaksana dengan nyaman dan kondusif, kualitas proses pembelajaran tersebut dapat ditingkatkan lagi apabila terdapat penunjang yang lebih baik, yaitu mengenai faktor sarana dan prasarana. Pembelajaran di sekolah akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan jika keempat faktor yang disebutkan di atas dapat saling menyesuaikan dan dimaksimalkan dengan adanya sarana dan prasarana yang terkelola.

Sekolah bertaraf standar atau Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang telah mencapai standar minimal dalam hal ketersediaan fasilitas dan kualitas akademik dan non akademik yang dimiliki oleh sekolah. Bagi sekolah yang berada dibawah standar, seperti sekolah rintisan dan sekolah potensial, perlu memacu diri untuk mengejar ketertinggalannya baik dari segi sarana dan prasarana ataupun kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan standar minimal. Selanjutnya, perlu diprogramkan agar kekurangan tersebut dapat terpenuhi tahap demi tahap. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran, anataralain gedung, ruang, meja, kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas secara tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, antara lain halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Karena sarana dan prasarana pendidikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran, maka sarana dan prasarana yang sudah ada harus bisa dioptimalkan penggunaannya. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pada bab VII pasal 42 ayat 2 mencantumkan bahwa: Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketentuan ini juga tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007 tanggal 28 juni tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah meliputi standar satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang mencakup ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga. Khususnya untuk Peraturan Kabupaten Aceh Tenggara ada aturan Bupati Aceh Tenggara No. 37 Tahun 2019 422/33/Lil.1/2019 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Di Kabupaten Aceh Tenggara dan berdasarkan peraturan ini, Kepala Sekolah SD

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

Negeri 6 Kuta Cane telah membuat SK No. 422/33/LII.1/2019 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana SD Negeri 6 Kuta Cane yang menjelaskan standar Sarana Prasarana yang harus dicapai dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran. Akhir-akhir ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang belum mencukupi standar dan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Keadaan seperti itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan data observasi di Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara mengenai perencanaan masih ada yang bergantung diri dari bantuan pemerintah, sehingga sarana yang diterima kadang kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, disamping itu karena proses birokrasi dengan instansi yang terkait menyebabkan apa yang seharusnya dibutuhkan pada saat itu bisa terpenuhi dalam selang waktu yang lama atau dengan kata lain kebutuhan itu sudah basi. Kemudian pada aspek pemeliharaan dan pengaturan penggunaan juga masih belum optimal. Sarana dan prasarana yang ada dilakukan perawatan disaat kegiatan di sekolah tidak terlalu padat, keadaan tersebut dikarenakan keterbatasan pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut secara kuantitas maupun kualitas. Kurangnya pengetahuan dari

penggunaan menyebabkan sarana yang ada digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga mengalami kerusakan. Sarana dan prasarana dalam suatu lembaga pendidikan penting sekali untuk diperhatikan karena merupakan penunjang dalam proses pembelajaran, baik kegiatan ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler. Berikut gambaran sarana dan prasarana di SD Negeri 6 Kuta Cane.

Tabel 1.1

Sarana dan Prasarana SD Negeri 6 Kuta Cane

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Ruang Kelas	8
2	Ruang Laboratorium	0
3	Ruang Perpustakaan	0
4	Alat Peraga	1
5	Infokus	1
6	Alat Olahraga	1

Sumber: Data Sekolah SD Negeri 6 Kuta Cane

Berdasarkan data tersebut bahwa sekolah SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara adalah sekolah yang sarana dan prasarananya sangat kurang. Dalam mengatasi permasalahan tersebut kepala sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan manajemen dalam meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Maka dalam memenuhi standarisasi sarana dan prasarana, kepala sekolah SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten

UNIVERSITAS MEDAN AREA mengeluarkan SK tentang Peningkatan sarana dan prasarana

yang tertera di Lampiran 1 penelitian ini. SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara jugatelah menyusun manajemen untuk menghadapi permasalahan sarana dan prasarana kedepannya nanti.Strategiyang telah dilakukan oleh SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara meliputi sarana dan prasaranayang memadai,menciptakan proses pembelajaran yange fektif,meningkatkan profesionalismeguru dengan diadakannya *training* bahasainggris,diklatatau*workshop*,kemudian meningkatkan kualitas pesertadidik dengan diadakannya Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).Namun secara kualitas, perkembanganny amasih belummerata.

Proses belajar mengajar di SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara merupakan inti dar iprosespendidikan formal dengan guru sebagai pemeranutama. Para pakar pendidikan seringkali menegaskan bahwa guru merupakan sumber dayamanusia yang sangat menentukan keberhasilan program mampu dalam menyampaikan materi pelajaran.Sehingga hasil belajar siswa berada padatingkat yang optimal.Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar, namun bukan berarti keberadaan unsur-unsur lain tidak begitu penting. Keberhasilan seorang guru di pengaruhi banyak faktor,terutama sarana dan prasarana pengadaan alat-alat sekolah yang akan mendukung kelangsungan proses belajar mengajar.

Jadicukupjelasbahwa alatpendidikan(manajemensarana prasarana) merupakan faktor pendukung dalam mencapai tujuan pendidikan selain faktor-faktorlain.Pendidikanakan lebih dinamis dan pengajaran akan lebih dalam

menyajikan pendidikan yang lebih luas. Peran dan keberadaan kepala sekolah dan pengelola sarana dan prasarana sangatlah penting dalam usaha peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan komponen pendukung untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan kelancaran proses pembelajaran dalam lingkup SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Pihak-pihak yang langsung berurusan dengan sarana dan prasarana dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola yang diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan administrasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi SK Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kuta Cane No. 422/33/III.1/2019 tentang standarisasi sarana dan prasarana di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi SK Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kutacane No. 422/33/III.1/2019 tentang standarisasi sarana dan prasarana di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan standarisasi sarana prasarana di SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi SK Kepala Sekolah No. 422/33/III.1/2019 tentang sarana prasarana di SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Untuk menganalisis hambatan implementasi standarisasi di SDN egeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

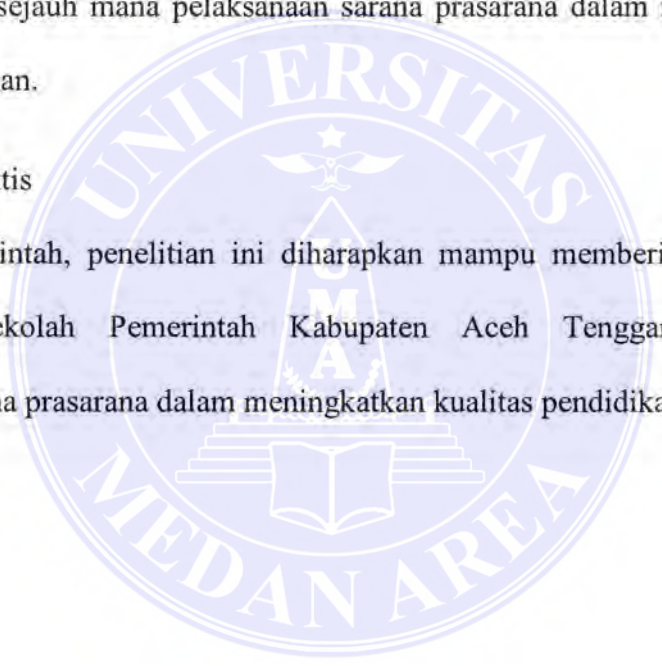
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan umumnya dibidang ilmu pendidikan dan ilmu administrasi publik, serta mengukur sejauh mana pelaksanaan sarana prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi sekolah-sekolah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengenai manajemen sarana prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Menurut Edward III Kebijakan publik didefinisikan sebagai *what governments say and do, or don't do. It is the goals or purposes of governments programs*. Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA kebijakan publik. Merujuk pada definisi di atas,

kebijakan publik tampil sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002). Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan
- b. Pelaksanaan dan pengendalian
- c. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan yaitu:

1. Pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik.
5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran serta masyarakat.
6. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7. Perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Menurut Riant Nugroho, rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% keberhasilan dan 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi (Nugroho, 2006). Suatu program kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus *Oxford-Advanced Learner's Dictionary* (1995:595) bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak atau akibat), *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara ataupun Undang-Undang lainnya). Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut, Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan. Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* (Abdul Wahab, 2007:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi atau aktor atau kelompok organisasi

atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

kebijakan tersebut (Abdul Wahab, 2007:61). Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (Abdul Wahab, 2007:61) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 kategori, yaitu:

1. *Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
- b. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
- c. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
- d. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan

sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan. Selanjutnya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa pendekatan meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan manajerial, pendekatan keperilakuan dan pendekatan politik seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab (2007:111-120). Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa dengan menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural maka implementasi dipandang sebagai proses prosedural. Pendekatan prosedural menjelaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam implementasi kebijakan.

Definisi prosedur (*procedure*) menurut Richard F. Neulschel (Jogiyanto, 2001:1) sebagai berikut “Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stallings, Jr. (Jogiyanto, 2001:2) mendefinisikan prosedur sebagai berikut “Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya”. Dengan demikian yang dimaksud prosedur adalah urutan-tahapan instruksi bagaimana suatu

kegiatan dilaksanakan menyangkut pelaksana, waktu, tata cara dan aturan maupun ketentuan yang berlaku yang dijalankan. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu kebijakan sesuai tata cara, aturan maupun ketentuan yang berlaku. Dimana yang dimaksud dengan tata cara adalah urutan bagaimana kegiatan dilakukan, aturan adalah hal-hal yang bersifat mengatur sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan dan ketentuan adalah hal-hal yang bersifat mengikat berkaitan dengan aturan yang ada. Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik.

Menurut Udoji (Wahab 2008:64), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood (Tangkilisan 2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones (Tangkilisan 2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

penetapan Undang-Undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (Winarno 2014:148), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata. Proses implementasi berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh Badan (Instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh Badan-Badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

2.3 Model Implementasi Kebijakan

Edward (Subarsono, 2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward III menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor

yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi mengkehendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan mengkehendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi mengkehendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,

sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.4 Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980:10) dan Quade (1984:310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986:12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah.
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

Sedangkan menurut Goggin *et al.* (1990:20), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel:

1. Dorongan dan paksaan pada tingkat federal.
2. Kapasitas pusat atau Negara.
3. Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar

dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat. Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dari Korten juga relevan digunakan sebagai kriteria pengukuran implementasi kebijakan. Dengan kata lain, keefektifan kebijakan atau program menurut Korten tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Menurut Quade (1984:310), dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

1. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan.
2. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan.
4. Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang mengembangkan kerangka kerja analisis implementasi (Wahab, 1991:117). Menurutnya, peran penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan Sabatier diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap, kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya, pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat. Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup

kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber daya, keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, dan akses formal pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007:16). Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup *output* kebijakan badan pelaksana, kesediaan kelompok sasaran mematuhi *output* kebijakan, dampak nyata *output* kebijakan, dampak *output* kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan dan perbaikan.

2.5 Pengertian Sarana dan Prasarana

Mulyasa (2004:49) memaparkan bahwa yang disebut dengan sarana belajar merupakan segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh guru atau siswa dalam proses belajar mengajar contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pembelajaran. Selain itu, menurut Tholib (2000:97) sarana pendidikan adalah peralatan yang secara langsung yang dapat mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Berbeda dengan pendapat Daryanto (2008:51) yang disebut dengan prasarana berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya: lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. Adapun prasarana belajar menurut Makin & Baharuddin (2010:84) adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju

sekolah dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di atas bahwa sarana belajar bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi ajar, dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian dan menerima materi pembelajaran. Sedangkan prasarana belajar untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan, perlengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah KTSP dimana penerapan desentralisasi pengambilan keputusan, memberikan hak otonomi penuh terhadap setiap tingkat satuan pendidikan. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu tolak ukur dari mutu sekolah. Untuk itu keberadaan sarana pendidikan mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan, dan termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proses pendidikan. Tanpa sarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa mengagalkan pendidikan.

Suatu kejadian yang mesti dihindari oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Proses pendidikan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Agar tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai maka perlu diperhatikan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan tujuan pendidikan itu. Dalam kaitannya dengan usaha menciptakan suasana yang kondusif itu sarana dan prasarana pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Sehingga baik buruknya manajemen sarana dan prasarana pendidikan akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran.

2.6 Macam-macam Sarana Prasarana

Sehubungan dengan sarana belajar mengajar atau pendidikan, Bafadal (2014:2-3) mengutip dari Nawawi mengklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pembelajaran, yaitu ditinjau dari habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya

pada saat digunakan dan hubungannya dengan proses belajar mengajar.

Penjabarannya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai

Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pembelajaran atau pendidikan, yaitu:

a. Sarana pendidikan (belajar) yang habis dipakai

Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu relative singkat. Seperti kapur tulis, spidol, penghapus, dan sapu, serta beberapa bahan kimia yang digunakan dalam pembelajaran IPA.

b. Sarana pendidikan yang tahan lama

Sarana pendidikan yang tahan lama yaitu keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu yang relative lama seperti bangku, kursi, mesin tulis, *computer* dan peralatan olahraga.

2. Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan

Sarana belajar atau pendidikan jika ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan juga dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Sarana pendidikan yang bergerak

Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau pindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Seperti lemari arsip, bangku dan kursi yang bisa digerakkan atau dipindahkan kemana saja.

b. Sarana pendidikan yang tidak bergerak

Sarana pendidikan yang tidak bergerak yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan seperti tanah, bangunan, sumur, menara, PDAM, yang relatif tidak mudah untuk dipindahkan ke tempat-tempat tertentu.

3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar

Sarana belajar atau pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti kapur tulis, spidol, alat peraga, alat praktik dan media atau sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar.

b. Sarana pendidikan secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di kantor.

Sedangkan prasarana pendidikan atau pembelajaran bisa di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu: Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung dapat menunjang terjadinya proses belajar mengajar seperti ruang kantor, kantin, mesjid, tanah, jalan menuju sekolah, makar kecil, UKS, ruang kepala lembaga, dan tempat parkir kendaraan (Bafadal, 2014:3).

Dapat disimpulkan sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 sudut yaitu: habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu: prasarana pendidikan yang secara

langsung digunakan untuk proses belajar mengajar dan prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar.

2.7 Standardisasi Sarana dan Prasarana

Kata standardisasi (Handoko, 2011) bukan berasal dari kata standard + isasi, tetapi merupakan sebuah kata dasar hasil serapan dari bahasa asing. Kata standardisasi mempunyai arti penyesuaian bentuk (ukuran atau kualitas) dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan (Barnawi & Arifin, 2012:86). Standardisasi sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai suatu penyesuaian bentuk, baik spesifikasi, kualitas, maupun kuantitas sarana dan prasarana sekolah dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik serta meningkatkan kinerja penyelenggara sekolah. Yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagaimana dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan (Mulyasa, 2006:20). Sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindah tempatkan sesuai kebutuhan para pemakainya. Contohnya, meja, kursi, alat-alat praktik dan sebagainya. Kemudian, untuk sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit jika dipindahkan, misalnya saluran listrik dan LCD yang dipasang permanen. Dalam hubungan dengan proses pembelajaran, sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang tadinya abstrak dapat dikonkritkan melalui alat peraga sehingga siswa lebih mudah dalam menerima pelajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada tiga jenis yaitu visual, audio, dan audiovisual. Adapun menurut Ibrahim Bafadal (2004, dikutip dalam Fardiyono, 2015), menjelaskan jenis-jenis prasarana pendidikan di Sekolah biasa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium.
2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contoh, prasarana sekolah jenis tersebut diantaranya adalah ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.

Sehubungan dengan itu maka terdapat macam-macam sarana dan prasarana yang di perlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang kelas yaitu tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.
- b. Ruang perpustakaan yaitu tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan.
- c. Ruang laboratorium adalah tempat siswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan.
- d. Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.
- e. Ruang kesenian adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni.
- f. Fasilitas olah raga adalah tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.

Keputusan Menteri P dan K No. 079/ 1975 menguraikan sarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu:

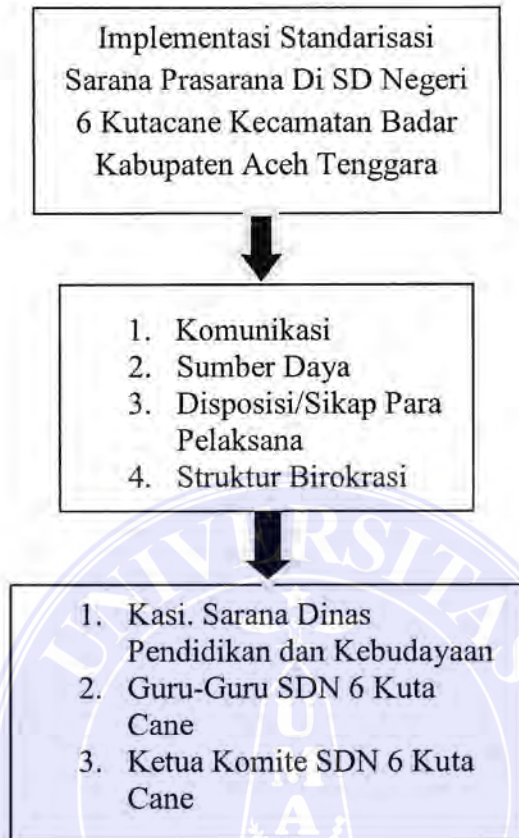
- a. Bangunan dan perabot sekolah.
- b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium.
- c. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audio visual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan harus terpenuhi agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi sekolah sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan harus disediakan dengan porsi yang ideal untuk mencukupi kebutuhan lingkungan pendidikan dan mendukung peningkatan prestasi sekolah.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang di jabarkan dalam penelitian ini meliputi :

Gambar 1.1
Skema Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan teknik analisis Kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data (Creswell 2010:5). Alasan lain penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena ingin memahami secara mendalam bagaimana implementasi SK Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kuta Cane No. 422/33/III.1/2019 tentang standarisasi sarana dan prasarana di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, yang beralamat di Tanah Merah, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi di atas, karena ingin menganalisa lebih jauh bagaimana implementasi SK Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kuta Cane No. 422/33/III.1/2019 tentang standarisasi sarana dan prasarana di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Dan ingin mengetahui apa saja hambatan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana di SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 – Februari 2020.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat mer informasi (Nasution, 2003:32). Sumber data (subjek penelitian) yang adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tersebut di dasarkan atas metode *key person*. Dalam penelitian ini yang menjadi *key person* adalah:

1. Informan kunci, yaitu Kasi. Sarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Informan utama, Guru-Guru SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Informan tambahan, Ketua Komite SDN 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2010:145).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan kepada sumber data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

merupakan data yang didapat dari hasil observasi langsung di lapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara kepada berbagai narasumber seperti Kasi. Sarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Guru-Guru SDN 6 Kuta Canedan Ketua Komite SDN 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang dapat memberikan informasi. Pengumpulan Data Primer dapat diperoleh melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sehubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan di SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan berulang-ulang secara intensif. Adapun alat dalam pengambilan data seperti, tape recorder, *handphone*, foto dan data yang termasuk ke dalam dokumentasi.

3. Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian (Suyanto, 2005:171).

Sedangkan data sekunder yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur.

internet, dari SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang tercakup dalam wilayah studi. Pengumpulan Data Sekunder dapat diperoleh melalui menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan *key person* (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Karena itu disebut juga wawancara intensif (Kriyantono, 2006:98). Dengan teknik ini diharapkan informan lebih terbuka dan berani dalam memberikan jawaban dan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon mereka lebih detail.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian akan disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk non-numerik atau data-data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka tapi interpretasi dalam bentuk pernyataan. Sedangkan metode analisis kualitatif yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan dan gambaran wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial

maupun ekonomi yang adadi SD Negeri 6 Kutacane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58). Untuk lebih mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman 1988:156) :

3.5.1 Reduksi Data

Merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data seperti meliputi, meringkas.

3.5.2 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan seperti mengumpulkan informasi yang terkait dengan tema mengkategorisasikan informasi dalam kelompok yang spesifik.

3.5.3 Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis triangulasi data (observasi, wawancara, dokumentasi) maka pelaksanaan standarisasi sarana prasarana di SD Negeri 6 Kuta Cane Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut: Komunikasi telah berlangsung dengan baik dan hasilnya berupa kesepakatan seluruh pihak untuk menetapkan pemerataan standarisasi sarana dan prasarana di SD Negeri 6 Kuta Cane. Dan Sumber daya di SD Negeri 6 Kutacane dapat bekerja sama dengan baik dalam meningkatkan mutu dan sarana prasarana di sekolah tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 6 Kuta Cane dilakukan dengan baik, karena dilakukan dengan mekanisme organisasi yang baik dan mengarah pada asas pelaksanaan sarana dan prasarana yang ada. Baik mengenai konsep manajemen maupun teknik-teknik yang menyangkut pelaksanaan manajemen. Struktur birokrasi di bagi menjadi 3 bagian yaitu pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana, penyusunan rencana pengadaan dan seleksi penentuan skala prioritas. Struktur birokrasi di SD Negeri 6 Kuta Cane belum sepenuhnya mengadakan analisa terhadap materi pelajaran yang membutuhkan alat pelajaran, alat peraga serta media pendidikan di sekolah.

5.2 Saran

Dalam beberapa hal standarisasi sarana dan prasarana di SD Negeri 6 Kutacane masih ada yang perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Untuk itu

UNIVERSITAS MEDAN AREA bisa diperhatikan dan bisa menjadi salah satu

penyelesaian masalah yang dihadapi, yaitu antara lain sebagai berikut: Pada masalah pendanaan sebaiknya pihak sekolah selalu mengkoordinasikan dengan komite sekolah untuk musyawarah bersama memecahkan masalah dana lewat rekanan atau bantuan. Kekurangan dan SDM tenaga administrasi khususnya pengelolaan sarana dan prasarana sebaiknya semua sekolah dapat saling berkoordinasi dan lebih mengoptimalkan yang sudah ada dengan cara mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya. Selain itu dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintah juga harus melakukan bantuan dana, memperhatikan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Bagi guru yang merupakan pelaksana dan pemakai media pembelajaran atau alat peraga pada saat proses belajar mengajar hendaknya selalu menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang diperlukan serta mempunyai tanggung jawab yang sama, sehingga sarana dan prasarana selalu siap pakai dan dalam keadaan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- B.Suryabrata. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Daft, Richard L. *Manajemen Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Daryanto. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Karya, 2001.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universal Press. Yogyakarta: 2003.
- Depdiknas. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas. 2002.
- Djamarah, SyaifulBahri. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Jakarta: Rineka (2003). *Standar Kompetensi Guru (SKG)*. Jakarta: DepdiknasCipta. 2006.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2014.
- Hani, Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2006.
- Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Husaini Usman. *Manajemen*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2011.
- Ida, Bagoes Mantra. *Filsafat penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ibrahimn Bafadhal. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006.
- Kountor, D.M.S, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis: PPM*, 2003.
- Laga, Timor F. *“Kinerja Guru Profesional Sekolah Dasar di Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta: 2014.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya. 2013.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya: 2002.
- Mulyana, Dedy. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group: 2006.
- Muslich, Masnur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: BumiAksara. 2007.
- Mangkunegara, Anwar. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: RemajaRosdakarya. 2005.
- Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia: 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta: 2013.
- Sunarno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*, Yogyakarta: UNY: 2010.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group: 2005.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar: 2006.
- Sanjaya, Wina. *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Tangkilisan, Hesel, Nogi. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Transformasi Pemikiran*. Yogyakarta: Balairung: 2003.
- Usman, H. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara: 2006.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo: 2002.
- _____. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- _____. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Samani, Muclsdkk. 2006. *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC. <http://mediaindonesia.com>, 2008.

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab VII pasal 42 ayat 2 tentang Prasarana Satuan Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Non Buku:

<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/610/1/Radiyan%20Yogatama.pdf> (di akses pada tanggal 20 Februari 2020, 15:45 WIB).

<http://eprints.uny.ac.id/22246/1/Ferry%20Dwi%20Hidayanto.pdf> (di akses pada tanggal 23 Februari 2020, 20:43 WIB).

[https://www.academia.edu/4950994/PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH MANAJEMEN KURIKULUM KESISWAAN DAN SARANA DAN PRASARANA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP NEGERI 4 KEPANJEN](https://www.academia.edu/4950994/PENERAPAN_MANAJEMEN_BERBASIS_SEKOLAH_MANAJEMEN_KURIKULUM_KESISWAAN_DAN_SARANA_DAN_PRASARANA_DALAM_MENINGKATKAN_MUTU_PENDIDIKAN_AGAMA_ISLAM_DI_SMP_NEGERI_4_KEPANJEN) (di akses pada tanggal 25 Februari 2020, 11:18 WIB).

<https://media.neliti.com/media/publications/93694-ID-manajemen-sekolah-dalam-meningkatkan-mut.pdf> (di akses pada tanggal 25 Februari 2020, 15:19 WIB).

[https://www.academia.edu/28991736/Makalah SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN.docx](https://www.academia.edu/28991736/Makalah_SARANA_DAN_PRASARANA_PENDIDIKAN.docx) (di akses pada tanggal 25 Februari 2020, 20:41 WIB).